

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PP No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya adalah dengan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas-entitas pelaporan. Tiap-tiap daerah merupakan satu entitas yang akan membuat laporan keuangannya dan akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Laporan keuangan Pemda merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan

keuangan ini di buat setiap tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Sebelum menyusun laporan keuangan pemda terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun laporan keuangan Pemda maka laporan keuangan SPKD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu informasi laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis kurangpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan adanya berbagai skandal keuangan yang terjadi. Laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Jika berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya. Selanjutnya, berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan baik masyarakat, kreditur, dan investor internasional akan ragu menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban yang tinggi.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membantu aparaturnya dalam menyelesaikan tugas terutama dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah. Terkait dengan sumber daya manusia, menurut Sondang Siagian (2007) sumber daya manusia adalah aset terpenting dan tanpa sumber daya manusia yang baik maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya lainnya tidak berdaya guna dan berhasil guna. Sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula dari kualitas dan kapabilitas sumberdaya manusia didalamnya. Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama membutuhkan sumber daya yang berkualitas.

Salah satu indikator sumber daya yang berkualitas adalah tingkat pendidikan. Jika suatu dasar pendidikan dibangun dengan baik maka dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dibidang-bidang yang lain karena pendidikan merupakan suatu investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara atau di suatu organisasi tertentu. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas terutama dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah (Cahyadi, 2009). Hal ini didukung dengan pendapat Nazier (2009) bahwa kelemahan pemahaman akuntansi sektor publik diperparah dengan rendahnya dorongan untuk belajar lebih jauh dengan kesalahan

penempatan staf dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Fenomena yang terjadi mengenai tingkat pendidikan penyusun laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kupang belum cukup baik dimana sebagian besar pegawai yang menyusun laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang bukan berasal dari bagian akuntansi.

Berikut tabel data pegawai penyusun laporan keuangan mengenai tingkat pendidikan:

Tabel 1.1
Data pegawai penyusun laporan keuangan mengenai tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sederajat	17
4	Diploma	26
5	Sarjana	74
6	Pasca sarjana	12
	Bidang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Akuntansi	40
2	Non Akuntansi	89

Sumber: data primer diolah

Selain tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia juga dapat diukur dari pelatihan yang diikuti karyawan. Pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, sikap). Pelatihan tersebut merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan atau keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Hal ini juga

dikemukakan oleh Nazarudin (2008) bahwa pelatihan berdampak pada informasi yang dihasilkan oleh SDM akuntansi yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas sejalan dengan tujuan organisasi. Fenomena yang terjadi mengenai pelatihan akuntansi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kupang belum cukup baik dimana pelatihan yang diikuti pegawai sangat sedikit.

Berikut tabel pelatihan akuntansi pegawai penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.

Tabel 1.2
Data pegawai penyusun laporan keuangan mengenai pelatihan akuntansi

No	banyaknya pelatihan akuntansi yang diikuti	Jumlah (orang)
1	1 kali	35
2	1-5 Kali	74
3	>5 kali	30
Jumlah		70

Sumber: data primer diolah

Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh pengalaman kerja. Seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mampu mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab timbulnya kesalahan. Sementara itu menurut Cahyadi (2009), pengalaman kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legiatif bahwa pegawai telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam penyusunan anggaran dan laporan

keuangan. Fenomena yang terjadi mengenai pengalaman kerja penyusun laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kupang berdasarkan data yang didapat bahwa sebagian besar pegawai memiliki sedikit pengalaman kerja yaitu kurang dari 10 tahun di bidang akuntansi atau pembukuan.

Berikut tabel pengalaman kerja pegawai penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.

Tabel 1.3
Data pegawai penyusun laporan keuangan mengenai pengalaman kerja

No	Lamanya bekerja dibidang akuntansi	Jumlah (orang)
1	1 tahun	12
2	1-5 tahun	36
3	6-10 tahun	56
4	>10 tahun	25
Jumlah		70

Sumber: data primer diolah

Fenomena lainnya yang terjadi adalah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017 menurut Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang belum cukup baik.

Berikut Tabel Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan hal yang dikecualikan untuk Tahun Anggaran 2015 – 2017 menurut Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT.

Tabel 1.4
Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang
TA 2015

No.	Hal yang di keculikan
1.	Kas dibendahara pengeluaran diantaranya sebesar Rp.140.383.000.000.- yang terdiri dari sisa kas tahun 2012 sebesar Rp.65.383.000.- dan tahun 2015 sebesar Rp.75.000.000.- disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Piutang Pajak, diantaranya sebesar Rp.14.043. 512.378.- yang terdiri dari pajak reklame sebesar Rp.106.614.437.- dan PBB-P2 sebesar Rp. 13.936.897.941.- tidak didukung dengan rincian memadai.
3.	Investasi Permanen, dimana dari catatan dan dokumen termasuk Laporan Keuangan <i>audited</i> BUMD yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk meyakini nilai penyertaan modal pada PT. Sasando, PD Pasar Kota dan KPN Maju.
4.	Aset Tetap, dimana terdapat perbedaan pencatatan Aset Tetap antara Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan sebesar Rp. 49.8 Miliar, serta kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan peningkatan jalan sebesar Rp. 147,3 Miliar tidak dicatat sebagai penambah pada aset induk tapi dicatat sebagai aset baru dengan umur ekonomis selama 10 tahun.
5.	Beban Barang dan Jasa, belum termasuk beban yang berasal dari dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS.

Sumber: data primer diolah

Tabel 1.5
Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang
TA 2016

No.	Hal yang Dikecualikan
1.	Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kupang pada KPN Maju sebesar Rp. 21.750.000.000.-
2.	Penerimaan Sewa Alat Berat selama periode tahun 2016 belum diterima ke kas daerah sebesar Rp. 80.250.000.-
3.	Terdapat kekurangan fisik pekerjaan bangunan gedung dan jalan sebesar Rp. 296.405.219.-

Sumber: data primer diolah

Tabel 1.6
Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang
TA 2017

No.	Hal yang Dikecualikan
1.	Kas Lainnya, dimana nilai kas lainnya atas dana BOS sebesar Rp.1.142.763.163.- Pendapatan dana BOS sebesar Rp.48.253.189.250.- dan belanja dana bos sebesar Rp.47.110.426.087.- nilai ini belum dapat diyakini karena verifikasi belum dilakukan secara memadai oleh manajemen BOS dan pencatatannya tidak akurat. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut karena tidak tersedia data dan informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Investasi Permanen, dimana nilai Investasi Permanen Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.143.955.413.734.-. Dari nilai tersebut diantaranya terdapat investasi permanen pada KPN Maju sebesar Rp.16.861.895.387.- belum didukung dengan laporan keuangan dan investasi permanen pada PD Pasar sebesar Rp.34.805.361.637.- belum didukung dengan Laporan Keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang memadai.
3.	Aset Tetap, Saldo Aset Tetap per 31 desember 2017 sebesar Rp.1.391.107.894.710.-. Terdapat kelemahan pengendalian Intern yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yaitu adanya perbedaan nilai pencatatan Aset Tetap antara Bidang Akuntansi dan Aset dengan OPD sebesar Rp.51.923.236.958,14, sebanyak 85 unit aset tetap senilai Rp.257.352.628.759,- pada 5 OPD

	<p>belum dapat ditelusuri keberadaannya. Tanah yang digunakan untuk jalan minimal seluas 5,985.570 m² belum dicatat. Sebanyak 48 unit Aset Tetap masih dicatat dengan nilai Rp.0.00; kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan total nilai sebesar Rp.383.159.334.357,33 belum distribusikan sebagai penambah sebagai aset induk namun dicatat sebagai aset baru. Kegiatan rehabilitasi gedung dan bangunan sebesar Rp.21.144.448.864.- namun dicatat sebagai aset baru, serta aset tetap sebesar Rp.31.387.350.052.- pada dua OPD masih dicatat sebagai gabungan.</p>
--	---

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan Akuntansi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang ?
2. Apakah pelatihan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang ?
3. Apakah pengalaman kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang ?
4. Apakah tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang
2. Untuk mengetahui apakah pelatihan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang
3. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bagi penelitian lainnya yang memiliki tema serupa.

3. Hasil dari penelitian ini bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.